

15 SKPD “Buruk” Serap APBD T/A 2012

DPRD Harus Selektif Setujui Anggaran

APBD Provinsi Riau terus meningkat setiap tahunnya, hal itu tentunya dipengaruhi dari meningkatnya Pendapatan Daerah di berbagai sector. Namun, FITRA Riau meilihat peningkatan APBD Provinsi Riau meningkat setiap tahun, hanya sedikit sekali yang dipengaruhi dari peningkatan Pendapatan yang melebihi Target Anggaran Setelah Perubahan. Namun, sebagian besar dipengaruhi dari kinerja buruk pemerintah / SKPD dalam penyerapan anggaran sehingga menjadi SILPA tahun berjalan.

Lihat saja, tahun 2012 Pemerintah Provinsi Riau **SILPA APBD sebesar Rp. 1.903 Triliun**. Silpa tersebut berasal dari Pendapatan yang melebihi target dan tidak terserap oleh SKPD. Namun, SILPA yang berasal dari pendapatan yang melebihi target hanya Rp. 400 Miliar lebih, sedangkan lebih dari Rp. 1,5 Triliun berasal dari tidak maksimalnya penyerapan anggaran di tingkat satuan kerja.

Berikut FITRA Riau merilis 15 nama SKPD Selingkungan provinsi Riau yang buruk dalam penyerapan anggaran pada program kegiatan di belanja langsung pada APBD tahun 2013:

Rating Kinerja SKPD Terburuk Tahun 2012 Provinsi Riau

No	Nama SKPD	Penyerapan	Keterangan
1	DISPERINDAG	53.54%	Pilihan
2	DISPERTANAKAN	54.78%	Pilihan
3	DISHUT	62.85%	Pilihan
4	BKD	63.72%	Wajib
5	SEKWAN	65.13%	Wajib
6	DISTAMBEN	67.31%	Pilihan
7	DISTRANDUK	71.71%	Wajib
8	DINAS PENDIDIKAN	72.37%	Wajib
9	DISPORA	73.41%	Wajib
10	BAPEDA	74.54%	Wajib
11	SEKDA	76.20%	Wajib
12	DISBUDPAR	76.51%	Pilihan
13	BADAN KETAHANAN PANGAN	77.67%	Wajib
14	DISKANLUT	77.86%	Pilihan
15	BLH	78.13%	Wajib

Menempati urutan nomor satu terburuk adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan provinsi Riau, tahun 2013 untuk program dan kegiatan selama setahun hanya mampu menyerap 53,54%. Selanjutnya dinas peternakan hanya menyerapa 54.78%. Pada urusan wajib seperti Dinas Pendidikan juga mengalami buruk kinerja penyerapan anggaran, yaitu hanya mencapai 72.37%.

SECARA umum, hampi seluruh SKPD di lingkungan provinsi Riau tahun 2012 mengalami penurunan penyerapan dibandingkan tahun 2011 lalu. Meskipun terdapat beberapa

SKPD yang maksimal menyerapa anggaran dan mengalami kenaikan secara persentase dibandingkan tahun 2011 lalu.

Buruknya penyerapan APBD pada SKPD terjadinya hanya pada belanja program dan kegiatan pada belanja langsung. Sedangkan menurut hasil analisis bahwa belanja tidak langsung yang diperuntukkan gaji pegawai justru terserap besar, rata-rata diatas 90% di 15 SKPD tersebut. Hal itu jelas bahwa gaji, fasilitas, tunjangan, beban kerja, tidak berpengaruh pada tingginya penyerapan anggaran.

FITRA Riau melihat terdapat beberapa persoalan kenapa terjadi penyerapan anggaran yang relative rendah, sehingga tahun 2012 memiliki SILPA Rp. 1,903 Triliun.

- **Memaksakan Pagu Anggaran Tinggi**, setiap SKPD cenderung memberikan pagu anggaran yang tinggi di setiap item kegiatannya. Hal itu bisa dilihat dari realisasi masing-masing program dan kegiatan justru jauh dari anggaran yang sebenarnya. Selain itu juga pagu anggaran yang dibiarkan terus ditetapkan jauh dari angka sebenarnya akan rentan dengan praktek korupsi.
- **Realisasi Kegiatan Molor**, menjadi tradisi setiap tahun, 30 hari menjelang akhir tahun SKPD memaksakan kegiatan dan program terealisasi. Hal itu juga mengakibatkan rendahnya penyerapan anggaran serta tidak maksimalnya sasaran kegiatan program yang menggunakan dana APBD.
- **Aparatur Tidak Profesional**, buruknya kinerja APBD dalam pelaksanaan program dan penyerapan anggaran setiap tahunnya juga karena tidak profesionalnya aparatur yang menjalankan program dan kegiatan SKPD. Selain itu juga program – program yang dibuat asal jadi, dan serapan anggarannya maksimal.

Buruknya serapan anggaran, yang berakibat pada buruknya kinerja dan program pemerintah harus segera berbenah, agar hal itu tidak terus berulang setiap tahunnya. DPRD Provinsi Riau juga harus berperan aktif dalam proses control pemerintah dalam proses penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi anggaran pemerintah daerah.

Menghadapi moment APBD Perubahan 2013 ini, DPRD harus selektif dalam menyetujui alokasi anggaran di setiap SKPD. DPRD harus melihat dan menganalisis serapan selama satu semester ini dan dijadikan rujukan untuk menentukan anggaran SKPD. Selain itu, DPRD juga harus berani mengambil langkah pemotongan anggaran di SKPD – SKPD yang dinilai tidak layak dan tidak mampu menyerap anggaran.

“Jangan sampai semakin tinggi APBD, semakin tinggi pula SILPA tahun berjalan, dan Korupsinya”.

Pekanbaru, 15 Juli 2013
USMAN